

BAB II

CIDA SEBAGAI AGEN PEMERINTAHAN KANADA & HUBUNGANNYA DENGAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang CIDA sebagai agen pemerintahan Kanada & hubungannya dengan Indonesia, dimulai dengan sejarah terbentuknya CIDA, institusi yang dimiliki oleh CIDA sebagai lembaga bantuan pemerintahan Kanada dan keterlibatan CIDA hubungan antara Kanada dan Indonesia.

Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) adalah sebuah departemen yang dibentuk pada tahun 1909 pada masa Perdana Menteri Sir Wilfrid Laurier. Awal pembentukan departemen ini sebagai lembaga yang menerbitkan paspor untuk masyarakat Kanada, menyimpan dokumen kebijakan dan peristiwa penting dibawah *British Colonial Office* dan melakukan mitra bisnis dengan negara Amerika Serikat. Kanada berperan aktif dalam politik luar negerinya dengan semakin aktif di organisasi internasional seperti PBB dan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)*, yang sebagai advokasi dan *peacekeeping* pada Krisis Suez dan memecahkan masalah antar anggota NATO.

Pada era Perdana Menteri Pierre Trudeau, dianggap sebagai era *Golden Age of Canada Diplomacy*. Pada masa Perang Dingin, departemen ini lebih cenderung banyak melakukan hubungan kerjasama militer dan ekonomi di negara blok Barat. Selain itu bantuan DFAIT semakin luas bantuan yang tidak hanya bantuan

pemerintahan berupa modal dan perekonomian, namun juga sebagai bantuan pembangunan sumber daya manusia, perdagangan, mempromosikan ekspor negara berkembang, dan kebijakan mengenai imigran Kanada sehingga menyebabkan kepentingan dan prioritas DFAIT di Kanada yang semakin banyak.

A. CIDA Sebagai Agen Lembaga Kanada

DFAIT membentuk lembaga bantuan untuk negara berkembang yaitu *External Aid Office* (EAO) yang dimana sebagai Perdana Menteri Pierre Trudeau melihat peluang kerjasama yang tidak hanya dalam ekonomi dan bantuan militer. Namun perlu adanya pengembangan dalam hal sumber daya manusia di negara berkembang. Sehingga EAO diubah menjadi *Canadian International Development Agency* (CIDA) sebagai agen lembaga pemerintahan Kanada dalam pembangunan dan bantuan di negara berkembang.

a. External Aid Office (1960-1968)

Kanada memiliki peran penting dalam pembentukan *Colombo Plan* yang saat itu disebut sebagai program bantuan untuk negara anggotanya. Pemerintahan Kanada semakin berperan aktif dalam kerjasama maupun bantuan antar negara. Meskipun berada dalam situasi Perang Dingin, Pierre Trudeau menjalankan dan mempromosikan keadilan sosial melalui bantuan negara.

Bantuan negara dalam perekonomian menjadi salah satu strategi Kanada dalam tingkat investasi. Sehingga Pemerintahan Kanada membentuk *External Aid Office* (EAO) yang mulai dibentuk pada tahun 1960. Selain itu, EAO berpihak ke

Barat, dengan kata lain anggota G-7 atau negara berkembang yang memiliki ideologi sama sehingga akan terwujud suatu kerjasama dalam bantuan pembangunan dengan sasaran yang tepat. Dalam hal ini, bantuan negara Kanada lebih meluas tidak hanya dalam bantuan kemanusiaan namun juga lebih berfokus pada sektor perekonomian di negara berkembang. Selain itu, EAO lebih mengarah kepada kapitalisme dalam penggunaan modal pada bantuan, serta membuat negara berkembang yang semakin kurang berkembang.

Tabel 2.1
Alokasi Dana Canadian Bilateral External Aid

Colombo Plan	132,0
Commonwealth Africa	19,5
Commonwealth Carribean	17,2
Francophone Africa	12,0
Latin America	10,0
Total	\$ 190,7

Sumber: Erudit Journals: Jean Cermakin, *Canada's role in the foreign aid programmes to the developing nations: a geographical appraisal*
<https://www.erudit.org/en/journals/cgq/1968-v12-n26-n26/020808ar/>

Pada tahun 1968, EAO mengalokasikan dana mencapai \$190,7 tujuh tahun dalam menjalankan program bantuan maupun investasi modal ke negara berkembang. Hal ini menyebabkan negara mengalami pertumbuhan pembangunan yang pesat di beberapa negara berkembang. Contohnya di negara Indonesia berinvestasi dengan mendirikan industri pulp dan kertas yaitu *Indo-Canada Paper Mill Limited* yang mencapai 9.5%.¹

¹ Herb Thompson & Deborah Kennedy, *Journal of Asian Business*, Volume 12 No 2, 1996 "The Pulp and Paper Industry : Indonesia In An International Context", hlm 41-55

Pada era Perang Dingin yaitu semakin banyak distribusi bantuan dalam sektor perekonomian. Namun bantuan yang diberikan tidak mampu menyelesaikan masalah pembangunan di negara berkembang. Sehingga *Maurice Strong* membentuk CIDA. Dengan hal ini, CIDA dibentuk sebagai lembaga bantuan pembangunan khusus pemerintahan Kanada, yang tidak hanya memberikan bantuan di bidang ekonomi namun juga sosial. Selain itu, sebagai pihak yang netral CIDA, tidak melihat anggota blok barat dan blok timur saat tengah mengalami perang dingin.

b. Canadian International Development Agency

Sebelumnya EAO lebih fokus terhadap bagaimana bantuan negara melalui *Colombo Plan* dapat terealisasi dan mampu memberikan bantuan melalui sektor perekonomian dengan membuka industri maupun investasi bisnis. Pemerintahan Kanada menyadari bahwa bantuan tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk materi, namun perlu juga adanya pembangunan sumber daya manusia di negara berkembang. *Maurice Strong* sebagai Jenderal Direktur EAO beranggapan bahwa lembaga bantuan negara memiliki tujuan yang lebih luas dari bantuan negara. Sehingga pada tahun 1968 sebagai lahir CIDA sebagai *Official Development Assistance* (ODA) dari Kanada. CIDA memiliki tujuan juga untuk mengurangi kemiskinan, mempromosikan HAM dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2. 1
Logo Resmi CIDA



Sumber: Canada In The 1960s, Canadian Development Agency

<https://sites.google.com/site/canadainthe1960s/home/domestic/canadian-international-development-agency>

CIDA sebagai *technical assistance* dari Lembaga Pemerintahan Kanada dalam program proyek bilateral yang berdasar pada perjanjian dengan negara berkembang. Selain itu CIDA juga berkontribusi dalam perjanjian dengan mitra Pemerintahan Kanada, seperti organisasi sukarela, universitas, mitra kerjasama, organisasi professional, perkumpulan gereja dan lainnya, agar proyek tersebut dapat terwujud di luar negeri. CIDA mendukung mitra komersil antara Kanada dan negara berkembang di sektor firma swasta. Kontribusi CIDA juga sampai kepada program bank multilateral berkembang seperti Bank Dunia, *African Development Bank*, agen PBB seperti; UNICEF serta berbagai organisasi internasional lainnya. Agar pemberian bantuan terdistribusikan yang baik dan tepat sasaran dalam memberi bantuan, CIDA memiliki fokus utama pada 20 negara berkembang.

Gambar 2. 2

Persebaran Bantuan CIDA di Negara Berkembang



Sumber: Global Affairs Canada

<http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/home/> diakses pada 19 February 2017

Pemerintahan Kanada memainkan peran penting dalam program pengembangan kerjasama dengan beberapa 20 negara berkembang. Sesuai dengan mandat dan prioritas CIDA yang muncul setelah konsultasi publik lintas negara, dan sebagian besar dari program kerjasama yang dilakukan melalui barang dan jasa. Selama bertahun-tahun, Pemerintahan Kanada telah berkontribusi penting dalam berbagai proyek dan program pembangunan. Sebagai contoh, Pemerintahan Kanada sebagai pemimpin yang mendukung integrasi penuh perempuan sebagai kesetaraan gender dalam pengembangan masyarakat mereka. Tenaga Kerja Insinyur Kanada telah membantu membangun bendungan, sistem komunikasi, bandara dan rel kereta api, ahli tenaga profesional lainnya dalam program imunisasi, pendidikan, pengembangan masyarakat dan perlindungan

lingkungan. Selain itu, karena kurangnya Kanada dari masa kolonial dan reputasinya sebagai kekuatan menengah dan ‘broker yang jujur’, Pemerintahan Kanada telah mampu memainkan peran konstruktif di daerah yang rentan terhadap konflik seperti hak asasi manusia, tata kelola dan program rekonstruksi pasca perang melalui CIDA.

Organisasi ini memiliki tujuan untuk membangun reputasi internasional untuk inovasi dan kepemimpinan utama seperti:

- Mempromosikan kesetaraan perempuan
- Berpartisipasi substansial dari masyarakat sipil dalam program bantuan
- Menggunakan prinsip *Aid Effectiveness*
- Keterlibatan dalam *fragile states*
- Penerapan manajemen berbasis hasil
- Reformasi sistem bantuan kemanusiaan

1. Latar Belakang dan Perkembangan CIDA

Pada tahun 1950 dianggap sebagai fase Dekolonialisasi dan Perang Dunia II, yang banyak melibatkan beberapa negara untuk mencari dukungan antara Blok Barat dan Blok Timur. Selain itu bantuan luar negeri sebagai salah satu keberhasilan dari *Marshall Plan* agar meyakinkan Eropa bahwa Amerika Serikat sebagai negara adidaya akan memberikan bantuan kepada negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika. Sehingga hal ini menyebabkan perkembangan yang pesat dalam pembangunan di negara berkembang. Negara Kanada belum memiliki

lembaga khusus dalam hubungan antar negara yang saat itu masih dibawah aturan *British Colonies* sehingga sangat terbatas, untuk melakukan ekspansi yang dimana lebih kepada negara maju. Program bilateral yang dilakukan oleh Pemerintahan Kanada melalui Menteri Kerjasama Internasional saat itu hanya bantuan dalam bentuk perekonomian dan keamanan.

Dengan keaktifan Kanada dalam berbagai organisasi seperti *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan beberapa organisasi baik pemerintahan maupun non pemerintahan. *Colombo Plan* mulai terbentuk sebagai organisasi yang fokus pada pembuatan kerangka perjanjian hubungan bilateral antara negara maju melalui bantuan luar negeri pada sektor ekonomi dan pembangunan daerah.

Menurut Keith Spicer dalam *Samaritan State? External Aid in Canada's Foreign Policy*:

"Canada launched her development aid programme in 1950 with virtually no policy aim beyond a lively anti-Communist instinct and an exhilarating vision of free, multi-racial Commonwealth".²

Tujuan terbentuknya *Colombo Plan* sebagai pengembangan sumber daya manusia dalam sektor perekonomian. Hal ini menjadikan Kanada dapat meluaskan hubungan kerjasama tidak hanya dengan negara Eropa, namun juga beberapa negara di Sub-continent Indian yaitu Asia dan kepada negara yang baru saja merdeka baik yang bergabung dalam negara anggota persemakmuran di Afrika dan Karibia. Negara Kanada berperan aktif dalam *program bantuan*, yang

² Jean Cermakian, *Canada's Role In The Foreign Aid Programmes To The Developing Nations : A Geographical Apparsial*, hlm 3 <https://www.erudit.org/en/journals/cgq/1968-v12-n26-n26/020808ar/> diakses pada 5 Maret 2017

berupa bantuan makanan, komoditas, dan beberapa bantuan logistik lainnya. Selain itu, Kanada juga mendukung berbagai pembangunan di beberapa negara anggota persemakmuran dan negara Eropa. Kanada dalam *Colombo Plan* berperan sebagai *Technical Program* bantuan yang memberikan bantuan sebesar \$25.3 juta untuk bantuan modal, bantuan makanan dan komoditas, serta bantuan darurat.

Selama dua dekade berikutnya, program terus menurus memperluas kerjasama bantuan tidak hanya di negara persemakmuran Karibia 1958, Afrika 1960, dan negara Francophone Afrika 1961, namun juga di negara Amerika Latin pada tahun 1970.³ Dalam perkembangannya Pemerintah Kanada melihat bahwa bantuan negara tidak hanya distribusi dalam bantuan ekonomi, namun juga seperti pembangunan sumber daya manusia. Sehingga Pemerintah Kanada mulai mempersiapkan lembaga CIDA, yang fokus utamanya lebih luas seperti dalam bidang sosial dan keberlanjutan.

2. Misi dan Mandat CIDA

CIDA memiliki fokus utama pada kehidupan berkelanjutan, yang sasarannya di negara berkembang. CIDA memiliki misi sebagai;

“Lead Canada’s international effort to help people living in poverty”.

Agar tercapainya misi tersebut, CIDA memberikan bantuan kontribusi dalam perekonomian (pertumbuhan ekonomi berkelanjutan), sosial (memberikan masa

³ Brent Copley, Bernard Wood, Roger B. Ehrhardt , *Foreign Aid*, <http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/foreign-aid/> diakses pada 6 Maret 2017

depan yang lebih baik untuk anak-anak), lingkungan (memberikan bantuan dalam reboisasi hutan dan membangun irigasi sungai), dan kemajuan dalam demokrasi (menstabilkan negara yang cenderung rentan terhadap konflik) di beberapa negara sasaran seperti di Afrika, Asia, dan The Americas.⁴

Dalam program bantuan dalam kemiskinan dan pembangunan keberlanjutan menjadi fokus utama CIDA, sehingga memiliki mandat sebagai:

“To support sustainable development in developing countries in order to reduce poverty and contribute to a more secure, equitable, and prosperous world”⁵

Kemiskinan dapat terjadi karena kurangnya kemampuan masyarakat, kondisi dan keuangan daerah yang kurang mendukung, serta kurangnya kebebasan dalam berpendapat seperti dalam politik, sosial, dan perekonomian di negara berkembang.

Dalam implementasi mandat CIDA keberhasilan untuk mengurangi kemiskinan seperti Program CARE *Canada's Rural Maintenance Program* di Bangladesh. Sebagian besar perempuan Bangladesh diperkerjakan untuk memperbaiki jalan raya yang menghubungkan dengan negara. CIDA melakukan program agar memberikan peluang bisnis bagi perempuan dan anak-anak berangkat sekolah. Program ini berhasil perempuan Bangladesh sekitar 24000 semakin menekuni bisnisnya dan lulus sekolah. Kaum wanita semakin percaya diri dan di hormati di masyarakat. Selain itu di negara Peru, CIDA memberikan

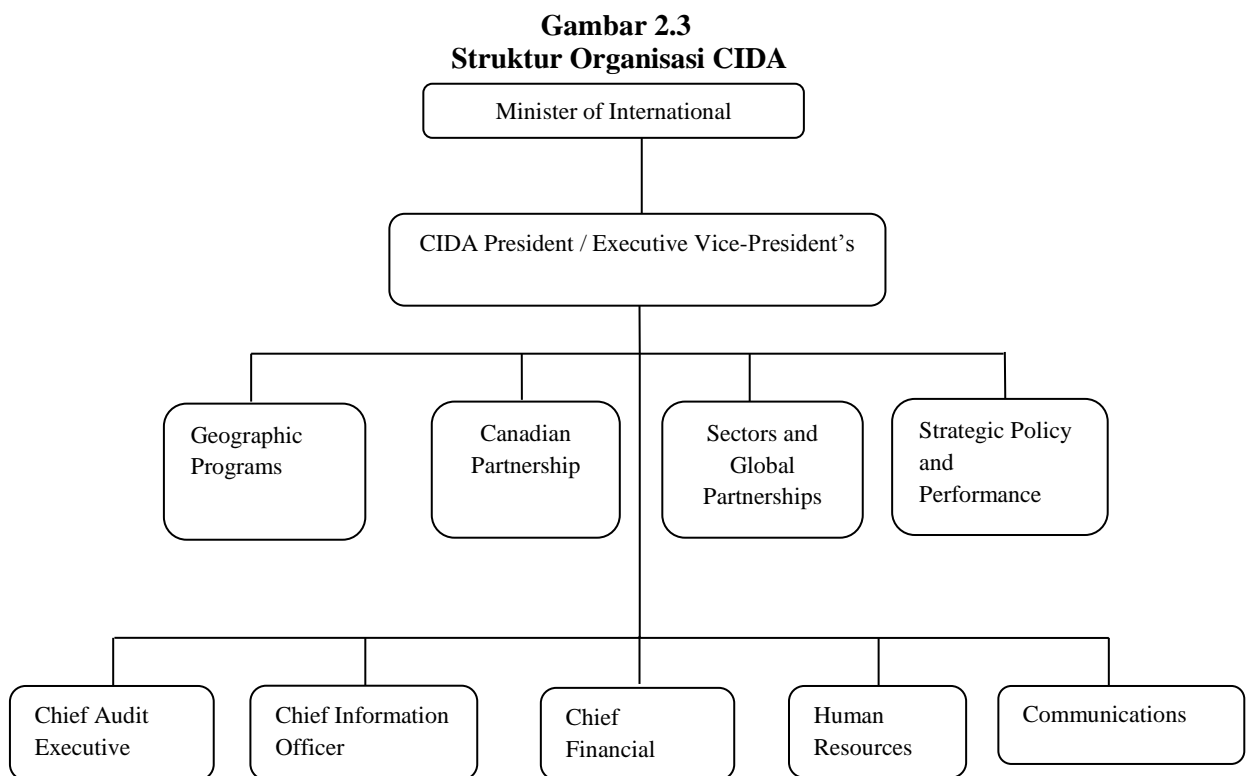
⁴ Treasury Board of Canada Secretariat, *Canadian International Development Agency-Report*, <http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2009-2010/inst/ida/ida01-eng.asp> diakses pada 7 Maret 2017

⁵ The Canadian Encyclopedia, *Canadian International Development Agency*, <http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canadian-international-development-agency/>, diakses pada 26 November 2016

program bantuan donasi mencapai 170 program diberikan dan mengurangi angka kemiskinan 1.3 juta masyarakat pedesaan di Peru.⁶

3. Struktur Organisasi CIDA

Agar tercapainya program-program CIDA yang sesuai dengan misi, dan mandat, maka membangun struktur anggota sangatlah penting. Dalam struktur organisasi CIDA terbagi menjadi lima bagian yang dalam kepentingan khususnya agar bantuan luar negeri dapat terdistribusi dengan baik untuk negara berkembang yang diantaranya:



Sumber:

Treasury of Board Secretariat Canada, CIDA, <https://www.tbs-sct.gc.ca/cla/idevi01-eng.asp>
diakses pada 1 Desember 2016

⁶ Canadian International Development Agency, *Departemental Performance Report*, hlm. 28

1. *Geographic Programs*

Bagian dari divisi ini memiliki peran untuk meliputi sebagian dari hubungan bilateral melalui bantuan. Selain itu juga mampu berkoordinasi dalam upaya kerjasama dan proses operasional dengan sistem yang koheren dan konsisten.

2. *Canadian Partnership*

Divisi ini memiliki peran dalam mendukung hubungan antara North-South yang memperkuat masyarakat sipil dan lokal, serta sektor swasta dalam *sustainable development*. Dalam divisi ini juga berkerjasama dengan bagian Geographic Programs, sehingga agar hubungan kedua negara mampu terkoordinasi dan selaras.

3. *Sectors and Global Partnerships*

Bagian divisi ini adalah membangun agen yang dapat diprioritaskan di berbagai sektor di kelas dunia. Selain itu juga memperkuat hubungan dengan mitra CIDA dalam pembangunan global. Peran dari divisi ini berkontribusi dalam meningkatkan *effectiveness* dalam organisasi multilateral, serta memberikan bantuan kemanusiaan tepat waktu dan efektif.

4. *Strategic Policy and Performance*

Pada bagian ini organisasi yang memastikan bahwa peduli dalam menciptakan strategi yang efektif, dapat berkoordinasi dengan baik dan koheren, penuh inovasi, mampu memegang prinsip yang jelas mengenai bantuan yang diberikan dan dapat dipercaya hasil mengenai kebijakan

yang diberikan. Selain itu bagian ini mampu memberikan komunikasi yang kredibel mengenai dampak dari agen ini nantinya.

5. *Human Resources, The Chief Financial Officer dan The Chief Information Officer*

Pada bagian ini memiliki peran penting yaitu dapat mengelola CIDA dengan baik dalam kemanusiaan, keuangan, dan informasi yang jelas.

B. CIDA dalam Hubungan Indonesia-Kanada

CIDA sebagai agen pemerintahan Kanada telah banyak mengubah pertumbuhan perekonomian dan *sustainable livelihoods*. Dengan adanya CIDA juga telah berperan penting sebagai penghubung kerjasama baik kedua negara.

1. Sejarah Singkat Hubungan Bilateral dan Bantuan Kanada di Indonesia

Secara informal hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada dimulai pada tahun 1948, saat Indonesia mencari dukungan dalam pengakuan kemerdekaan di tahun 1945 dalam Forum PBB secara *de jure* dan *de facto*. Hal ini President PBB Dewan Keamanan yaitu Jenderal McNaughton yang berperan signifikan dalam keberhasilan Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat. Upaya Jenderal McNaughton dengan melakukan negosiasi penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, dengan membentuk Komisi Tripartit. Negosiasi Tripartit ini kemudian mengarahkan pada pengakuan internasional tentang keadulatan Indonesia pada Desember 1949 di *Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB).

Hubungan bilateral antara kedua ini pada masa Orde Lama hingga pemerintahan pasca reformasi, berbagai macam program pembangunan dalam berbagai bentuk dan motivasi dilakukan. Hal ini dilakukan, dengan tujuannya adalah mengembangkan dan menguatkan Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang. Peran Kanada sebagai negara maju agar tercapainya berkembangnya negara sasaran, melalui bantuan luar negeri yang juga telah berkontribusi di Indonesia.

Hubungan antara Kanada dan Indonesia secara diplomatik dan formal dimulai pada tahun 9 Oktober 1952. Saat itu juga bertepatan pada Indonesia membuka *Legation Office* (Kantor Perwakilan Diplomatik) Indonesia di Kanada untuk pertama kalinya di Quebec. Kerjasama yang dilakukan antar kedua negara ini yaitu Indonesia mulai bergabung Colombo Plan, sebagai organisasi ekonomi yang dengan sasaran pertumbuhan perekonomian di negara berkembang. Program yang dilakukan dalam Colombo Plan saat itu hanya mendirikan industri kertas dan pulp yaitu *Indo-Canada Paper Mill Limited* yang berada di kawasan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur.⁷

Pada tahun 1968 yang saat itu era kepemimpinan President Soeharto yang dimulai pada penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang berisi pertukaran nota kesepahaman antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Kanada, dengan memberikan bantuan untuk pembangunan Indonesia. Selain itu juga mulai adanya kerjasama pembangunan *Colombo Plan* yang kembali berjalan dan memberikan dampak pada pembangunan Indonesia.

⁷ Herb Thompson & Deborah Kennedy, *Journal of Asian Business*, Volume 12 No 2, 1996 "The Pulp and Paper Industry : Indonesia In An International Context", hlm 41-55

Akhir tahun 1996 Indonesia mengalami krisis moneter, hal ini mulai mengkhawatirkan Kanada sebagai salah satu pedonor hutang luar negeri Indonesia. Sehingga terbentuknya program konsultasi bilateral dua negara *Joint Declaration* melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) di tahun 1997. Perjanjian ini sebagai kesepakatan hubungan antara kedua negara di masa Orde Baru di bidang konsultasi pembangunan, ekonomi, finansial, hutang, dan pemerintahan. Selain itu program FKB sangat berguna dalam memperat hubungan kedua negara dan memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia.

Tahun 1997-1998 mengalami krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian dan keamanan yang tidak stabil. Namun dengan hal ini Kanada tetap mendukung dalam proses reformasi dengan membuat proyek bantuan reformasi pemerintahan yang terbagi menjadi 2 periode yaitu pada 27 Oktober 1998 dan 9 Mei 2003.

Walaupun hubungan bilateral Kanada dan Indonesia pada era ini fokus utamanya pada perekonomian dan industri, namun juga dalam kerjasama multilateral dengan beberapa organisasi maupun forum perekonomian. Pada September 2008 Dirjen Amerop berkunjung ke Ottawa dengan Dirjen Asia Selatan dan Osenia DFAIT, agar mengaktifkan kembali Forum Konsultasi Bilateral. Sebagai forum yang telah berperan membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Aktivitas CIDA di Indonesia

Indonesia merupakan secara geografis terluas dan populasi yang meningkat, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan tinggi, serta kurangnya sumber daya

alam. Pemerintahan Kanada melakukan hubungan bilateral khususnya pada bantuan luar negeri dengan mengandalkan CIDA sebagai ODA. Kedua negara ini berawal pada hubungan kerjasama dengan *Colombo Plan*, namun hal ini melalui organisasi ini tidak berjalan secara efektif karena Indonesia membenahi politik internal dan perekonomian domestik. Sehingga bantuan yang diberikan tidak secara signifikan bagi negara Indonesia.

Namun semenjak era Presiden Soeharto, hal ini berpengaruh semakin luasnya kerjasama antar negara. Dalam hal ini CIDA membuat program yaitu Proyek Manajemen Pengembangan Lingkungan / *Enviromental Management Development Project* (EMDI), karena pentingnya saat itu mengembangkan sumber daya alam serta harus melibatkan pemerintahan. Program pertama ini berlangsung pada tahun 1983 dan 1999, CIDA menanamkan modal yang lebih dari \$70 juta dalam program ini. Program ini memiliki tujuan yaitu sebagai prioritas utama pada lingkungan, *cross cutting theme* mengenai kesetaraan gender, dan komponen biophysical (misalnya proyek air).

Tabel 2.3

EMDI & Proyek Hubungan Lingkungan Environmental Linkages Project 1983-1999

Environmental Projects	\$M
<i>Environmental Management Development in Indonesia (EMDI) I</i>	2.5
EMDI II	7.9
EMDI III	37.7
Kolaborasi Proyek Lingkungan (<i>Collaborative Environmental Project</i>)	17.5
Pelayanan Dukungan Program Lingkungan <i>Environmental Programming Support Services (EPSS)</i>	4.0
Projects with Environmental Linkages	
Sulawesi Regional Development Project (SRDP) I dan II	54.8
<i>North Sulawesi Water Resources Institutional Strengthening Project (P3SU)</i>	18.0

Sumber: Canadian International Development Agency, *CIDA's Aid Effectiveness Action Plan 2009-2012*, hlm 5

CIDA mulai masuk sejak tahun 1991 melakukan kerjasama dalam pembangunan yaitu mengurangi kelaparan, *strategic significance*, dan transisi pemerintahan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 20 negara berkembang yang menjadi fokus negara berkembang dalam bantuan bagi

Kanada.⁸ Bantuan yang diberikan saat itu sekitar diatas \$375 juta (hingga 31 Maret 2005) dalam *development asisstance*.⁹ Dalam hal ini juga CIDA bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya yang fokus utamanya pada kehidupan berkelanjutan.

Pada masa Orde Baru kedua negara ini kembali melakukan hubungan bilateral dengan membuka forum FKB, yaitu sebagai konsultasi perekonomian kedua negara. Karena saat itu Indonesia mengalami krisis moneter.

Salah satu tantangan dalam pembangunan adalah mengurangi kemiskinan maupun kerentanan terhadap kemiskinan. Karena mengurangi kemiskinan sebagai salah satu mandat CIDA. Selain itu juga kerjasama dalam keamanan dan lingkungan yang stabil, hal ini dengan tujuan agar tercapainya pembangunan perekonomian yang baik. Tujuan utama CIDA di Indonesia, berusaha agar menambah pembangunan berkelanjutan dan aktivitas pembangunan kembali. Selain itu juga mendukung transisi demokrasi Indonesia dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara serta kerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat.

CIDA sebagai lembaga bantuan negara Kanada pendonor baik bilateral dan multilateral memberikan bantuan kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia akhir ini menyiapkan Strategi Mengurangi Kemiskinan yang terdapat empat rencana aksi. Program CIDA di Indonesia / *Indonesia CIDA Program* (ICP) telah dirancang untuk bekerja sama dengan pedonor lainnya dan mendukung upaya

⁸ Canadian International Development Agency, *Integrated Audit of Indonesia Country Program and Tsunami Response September 2009*

⁹ Canadian International Development Agency, *CIDA's Country Development Programming Framework for Indonesia 2005-2009*

Indonesia untuk menciptakan peluang ekonomi, memberdayakan masyarakat, membangun kapasitas antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, dan menyediakan untuk pendistribusian yang efektif dan tindakan perlindungan sosial yang adil.

Dalam strategi pengentasan kemiskinan, Pemerintahan Indonesia dengan program Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Program ini bekerjasama antar pemerintahan Indonesia dengan beberapa mitra internasional yang terdapat lima strategi utama:¹⁰

1. Perluasan kesempatan, dengan membuka akses pada pengembangan pembangunan pemerintahan daerah dari segi pengelolaan administrasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pemberdayaan lembaga masyarakat. Pemerintah akan memberdayakan pihak swasta, organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Dengan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap strategi penanggulangan kemiskinan
3. Peningkatan kapasitas melalui pengembangan pengelolaan sistem, sumber daya, dan jaringan. Dengan peningkatan ini diharapkan dapat mendorong aktor pembangunan (non pemerintah) untuk ikut aktif dalam penanggulangan kemiskinan.

¹⁰ Kurniawan Ariadi, *Perkembangan ODA Internasional dan Peluang Indonesia; Catatan Laporan Tahunan DAC-OECD*, 15.

4. Perlindungan sosial, dengan strategi penegakan dan pengawasan pada peraturan alam menjaga kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, guna memberikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan
5. Penataan kerjasama internasional. Hal ini pemerintah melihat mitra global sebagai aktor yang akan memberikan dampak baik kepada kemiskinan. Pihak asing berperan sebagai penyedia modal dan teknologi, lapangan pekerjaan, pengembangan fasilitas, serta sumber pemasukan negara melalui pajak.

Berdasarkan kesimpulan pada bab ini bahwa, bantuan luar negeri merupakan bantuan dari negara maju berkembang untuk negara industri yang semakin miskin maupun negara berkembang.

Menurut Brent Copley, Bernard Wood, Roger B. Ehrhardt dalam definisi *Foreign Aid*:

*“Foreign Aid is assistance from rich, industrialized countries to poorer, developing countries”.*¹¹

Negara Kanada mulai menginsiasikan program Bantuan Luar Negeri sejak tahun 1950 dalam bentuk bantuan keuangan, barang dan jasa ke negara miskin. Berawal dari dibentuknya *Marshall Plan* yang di inisiasikan oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya, dengan memberikan sumber daya ke negara Eropa sehingga mampu melaksanakan pembangunan di negara dan mampu berkembang pesat. Kanada berperan aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, UNICEF, dan *Colombo Plan* maka negara Kanada menginisiasikan Bantuan Luar Negeri bagi negara berkembang. Kanada dalam *Colombo Plan* berperan sebagai

¹¹ Brent Copley, Bernard Wood, Roger B. Ehrhardt , *Foreign Aid*, <http://www.thecanadianencyclopedia.com/en/article/foreign-aid/> diakses pada 6 Maret 2017

Program Bantuan Teknis yang memberikan bantuan sebesar \$25.3 juta untuk bantuan modal, bantuan makanan dan komoditas, serta bantuan darurat. Program Bantuan Luar Negeri memperluas program kerjasama bantuan tidak hanya di negara persemakmuran Karibia 1958, Afrika 1960, dan negara Francophone Afrika 1961, namun juga di negara Amerika Latin pada tahun 1970.¹²

Sejak kejadian 26 Desember 2004, yaitu Gempa Bumi dan Tsunami yang terjadi di Aceh. Kejadian ini menarik perhatian berbagai negara yang menyalurkan bantuan baik melalui organisasi pemerintahan dan non pemerintahan. Terdapat perubahan pola kerja hubungan kerjasama antara Kanada dan Indonesia. Jika sebelumnya CIDA sebagai bantuan negara berkembang hanya fokus kepada bantuan kemiskinan. Dalam hal ini CIDA juga mengambil peranan untuk terlibat dalam isu penanggulangan bencana, sehingga menjadi tantangan dalam bagi agen pemerintahan Kanada. Agar menjawab tantangan yang ada di Indonesia maka CIDA membuat program *Aid Effectiveness*. Hal ini menarik untuk dikaji yang akan dibahas di Bab III.

¹² Ibid